

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas. Ekonomi UII, 2004
- Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta : PT.Grasindo, 2010.
- Adi, Riyadi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Adnan Buyung Nasution. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007.
- Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*,Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Bhenyamin Hoessein. “*Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*,” Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000
- C.F. Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- H. M. Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- H.A.W.Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja. Grafindo Persada, 2002.
- Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto. *Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Inu Kencana Syafei.. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Jimly Asshidiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Laretna, Adishakti. *Revitalisasi Bukan Sekedar “Beautifcation”*. Urdi Vol.13, 2002.
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta : Total Media, 2013.
- Muh. Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media, 2009.
- Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*", dalam *Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah*, Volume I, Edisi Kedua 2004
- Soehino. *Ilmu Negara*, Ed.3, Cet.3. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang
Pentunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi
Kawasan
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan
Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1105 Tahun 1993 tentang
Koordinasi Pengelolaan Taman Monumen Nasiona
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Taman Monumen Nasional

Sumber lain:

- Danisworo, 2002 pengertian revitalisasi, (online) **Error! Hyperlink reference not valid.**
diakses 15 November 2020